



**PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERJANJIAN
KINERJA
TAHUNAN DAN TRIWULANAN



2019

Nomor : S-021/PW21/6/2019
Tanggal : 7 Januari 2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai - Makassar

Telepon (0411) 590591 - 590592, Faksimile (0411) 590595

Email : sulsel@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arman Sahri Harahap
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 7 Januari 2019

Pihak Pertama,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	70	
	1.2 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik *)	%	75	
	1.3 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik) *)	%	60	
	1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	56	
	1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	62	
2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	60	
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	75	
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80	
	2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80	
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	80	
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	55	
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	70	
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	
	6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	
	6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	83,33	
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	16,67	
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	
	7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	
	7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	62,5	
	7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	37,5	
B Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	59	
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	130	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
3.	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	9
4.	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16
5.	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6
6.	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	55
7.	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	7.1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	41
A	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program			
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	skala 1-10	8
B	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			
1.	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	12
2.	Termanfaatkannya Aset secara Optimal	2.1	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP	unit	0
		2.2	Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	unit	28
		2.3	Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP	unit	0
		2.4	Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	unit	0
		2.5	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	unit	0
		2.6	Tersedianya Sarana Prasarana BPKP	unit	10
		2.7	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	unit	0

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp. 5.499.591.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp. 31.409.338.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp. 744.536.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp. 217.000.000,00
Jumlah	Rp. 37.870.465.000,00

Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Jakarta, 7 Januari 2019

Kepala Perwakilan,



Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program						
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	-	-	-	-	70
	1.2	Persentase BUMN/ Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik *)	%	-	-	-	75	75
	1.3	Persentase BUMN/ Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	%	-	-	-	60	60
	1.4	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	-	-	56	56	56
	1.5	Persentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	-	-	62	52	62
2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	19	31	46	60	60
	2.2	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	13	32	38	75	75
	2.3	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	12	30	36	70	70
	2.4	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	-	-	-	80	80
	2.5	Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	-	-	-	80	80
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	-	-	-	80	80
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	-	6	15	40	55
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	-	35	35	70	70
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100	100	100
	6.2	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	-	-	-	-	0
	6.2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	75	83,33	83,33	83,33	83,33
	6.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	-	-	16,67	16,67	16,67
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	-	-	100	100	100
	7.2	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	-	-	-	-	0
	7.3	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	20,83	54,16	62,5	62,5	62,5
	7.4	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	-	-	18,75	37,5	37,5

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	6	18	12	23	59	
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	17	43	33	37	130	
3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	-	3	3	3	9	
4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	4	4	4	4	16	
5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	-	-	6	-	6	
6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	13	13	12	17	55	
7. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	6	12	9	14	41	
A Sasaran Program	Indikator Kinerja Program							
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	skala 1-10	-	-	-	8	8	
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							
1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	3	3	3	3	12	
2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal	2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP	unit	-	-	-	-	0	
	2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	unit	28	-	-	-	28	
	2.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP	unit	-	-	-	-	0	
	2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	unit	-	-	-	-	0	
	2.5 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	unit	-	-	-	-	0	
	2.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP	unit	10	-	-	-	0	
	2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	unit	-	-	-	-	0	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp	807.843.000,00	1.659.357.500,00	1.318.132.500,00	1.714.258.000,00	5.499.591.000,00	
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp	7.248.308.769	9.664.411.692	7.248.308.769	7.248.308.769	31.409.338.000	
3.	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp	186.134.000	186.134.000	186.134.000	186.134.000	744.536.000	
4.	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp	-	217.000.000	-	-	217.000.000	
	Jumlah	Rp	8.242.285.769	11.726.903.192	8.752.575.269	9.148.700.769	37.870.465.000	

Jakarta, 7 Januari 2019

Kepala Perwakilan,

Arman Sahri Harahap

Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN